

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Singkat PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

Dalam rangka menunjang pembangunan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk mendirikan lembaga-lembaga perkreditan rakyat di pedesaan, salah satunya yang kita kenal dengan nama Bank Karya Produksi Desa (BKPD).

Sebetulnya lembaga perkreditan rakyat sudah ada sejak sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, bahkan telah dikenal sejak zaman Belanda. Namun pada masa pendudukan Jepang dan zaman proklamasi kemerdekaan lembaga-lembaga tersebut banyak yang tidak berfungsi.

Landasan pemikiran pembentukan lembaga perkreditan ini ialah ditinjau dari segi ekonomi dan geografis menunjukkan potensi ekonomi (keuangan) di daerah pedesaan cukup besar, tetapi karena lemahnya daya tukar potensi tersebut semakin lama semakin menurun, hal ini disebabkan karena hal-hal dibawah ini:

1. Adanya tengkulak yang kegiatannya menekan harga pembelian dari petani dan meningkatkan harga penjualan sehingga hasil yang lebih besar diterima para tengkulak dan rata-rata berasal dari kota. Demikian pada hakekatnya terjadilah pelarian uang dari daerah, sehingga daerah pedesaan yang merupakan daerah sentra produksi akan kekurangan uang modal untuk memproduksi;
2. Struktur moneter dan perbankan yang tidak merata pada saat itu, dimana uang yang beredar dan berkembang di pedesaan terbatas, karena bank adanya di kota.

Dengan demikian, yang menjadi masalah disini adalah bagaimana cara mengalokasikan uang sebagaimana penjelasan di atas agar tidak terjadi

ketimpangan sehingga potensi produksi di daerah pedesaan dapat dipulihkan kembali dan ditingkatkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Gubernur Jawa Barat pada waktu itu Bapak Mayjen Mashudi mengintruksikan pada para Bupati atau Walikota daerah se-Jawa Barat dengan instruksinya Nomor. 2 Instr/B.II/V/66 untuk melaksanakan pembentukan Bank Karya Produksi Desa (BKPD), sebagai tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 21 Desember 1965 yang diperbaiki tanggal 15 Maret 1966 yaitu Nomor 40/B.I/Pem/SK/65 perihal Pembentukan Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Dengan instruksinya tersebut, selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 1966 di tiap-tiap ibukota Kabupaten/Kotamadya harus terdapat atau didirikan suatu Bank Karya Pembangunan dengan mengindahkan peraturan-peraturan pelaksanaannya yaitu Stc. No. 180a/Finek/3/66.

Oleh karena itu berdasarkan surat keputusan tersebut di atas, melalui surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor. Pe.003/170/SK/1967 tanggal 10 Juli 1967 tentang Pembentukan BKPD, maka pada tanggal 10 Juli 1967 BKPD secara resmi dibuka atau berdiri, tetapi pada tanggal 1 Agustus 1997 diubah menjadi PD. BPR. BKPD.

Adapun dasar hukum pembentukan atau pendirian BKPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Bank Desa dari Departemen Keuangan RI (Kementerian Keuangan No. Kep. 358/DJM/III.3/8/1973 tanggal 2 Agustus 1973);
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 40/B.1/Pem/SK/1965 instruksi Gubernur Kepala DT I Jawa Barat No. 17/Instr/AF/1966 tentang pembentukan BKPD;
3. Peraturan Daerah Kabupaten DT II Tasikmalaya No. 17 tahun 1977 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD);

4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya No. Pe.003/170/SK/81 tentang Pembentukan BKPD.

Pada tanggal 31 Agustus 1970 keluar Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. B.331/MK/b/70 tentang Larangan Pendirian Bank-Bank Sekunder, seperti BKPD maka kegiatan penambahan BKPD menjadi terhenti. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, ditetapkan persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga perkreditan desa tersebut sebagai Bank Perkreditan rakyat.

Pada tahun 1997 BKPD dan Bank Pasar milik Pemkab Tasikmalaya melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, BKPD dan Bank Pasar berubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD/Bank Pasar.

3.2 Visi dan Misi PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

3.2.1 Visi PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

“MENJADI BPR YANG TUMBUH, SEHAT DAN MANFAAT”

Penjelasan Visi :

Menjadi BPR yang tumbuh berkesinambungan dan sehat sehingga menjadi BPR dengan Asset 5 besar di Jawa Barat pada tahun 2025 serta senantiasa mempunyai nilai tambah bagi stakeholder dan manfaat bagi seluruh masyarakat.

3.2.2 Misi PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

1. Memberikan Solusi kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Perbankan dengan ragam produk BPR yang kompetitif dengan pelayanan prima dan SDM yang professional.
2. Meningkatkan tata kelola Perusahaan serta membangun budaya organisasi yang didasari oleh nilai-nilai inti perusahaan.
3. Meningkatkan kontribusi PAD dan pengembangan UMKM untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.

3.3 Nilai-Nilai Inti PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

1. SERVICE EXCELLENCE

- 1) Memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah.
- 2) Pro aktif dan cepat tanggap.

2. PROFESIONAL

- 1) Mempunyai pengetahuan yang luas dan keterampilan tinggi.
- 2) Konsisten dan bersungguh–sungguh dalam menjalankan tugas.
- 3) Berorientasi terhadap hasil kerja yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. INTEGRITAS

- 1) Bersikap, berperilaku serta bertindak jujur.
- 2) Disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta mampu mengemban kepercayaan yang diberikan.

4. RELIGIUS

- 1) Berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mengawali setiap tindakan dengan niat ibadah.
- 3) Apa yang dilakukan hari ini harus lebih baik dari yang kemarin.

5. INOVATIF

- 1) Kaya dengan ide–ide baru yang mendukung kelancaran tugas.
- 2) Selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.

6. TRANSPARANSI

- 1) Setiap pelaksanaan tugas selalu dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Dalam melaksanakan tugas selalu berkoordinasi dan dilaporkan kepada pihak yang terkait secara struktural.

3.4 Kode Etik Pegawai PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

Perilaku yang berintegritas, jujur, dan profesional merupakan proses penciptaan karakter di lingkungan kerja yang memerlukan waktu dan proses. Penerapan aturan kode etik pegawai di PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya yaitu :

1. Pegawai wajib menjaga kerahasiaan bank.
2. Pegawai dilarang menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang di berikan oleh PD. BPR Artha Galunggung.
3. Pegawai wajib mengikuti ketentuan kepegawaian PD. BPR Artha Galunggung.
4. Pegawai dilarang menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi uang tambahan atau barang berharga untuk kepentingan pribadi atau keluarga yang berhubungan dengan pemberian atau pelayanan lainnya.
5. Pegawai dilarang menjadi anggota, pengurus, partai politik dan tau melakukan kegiatan partai politik.

3.5 Struktur Organisasi dan Tugas Wewenang Masing-Masing Bagian di PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

3.5.1 Struktur Organisasi PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

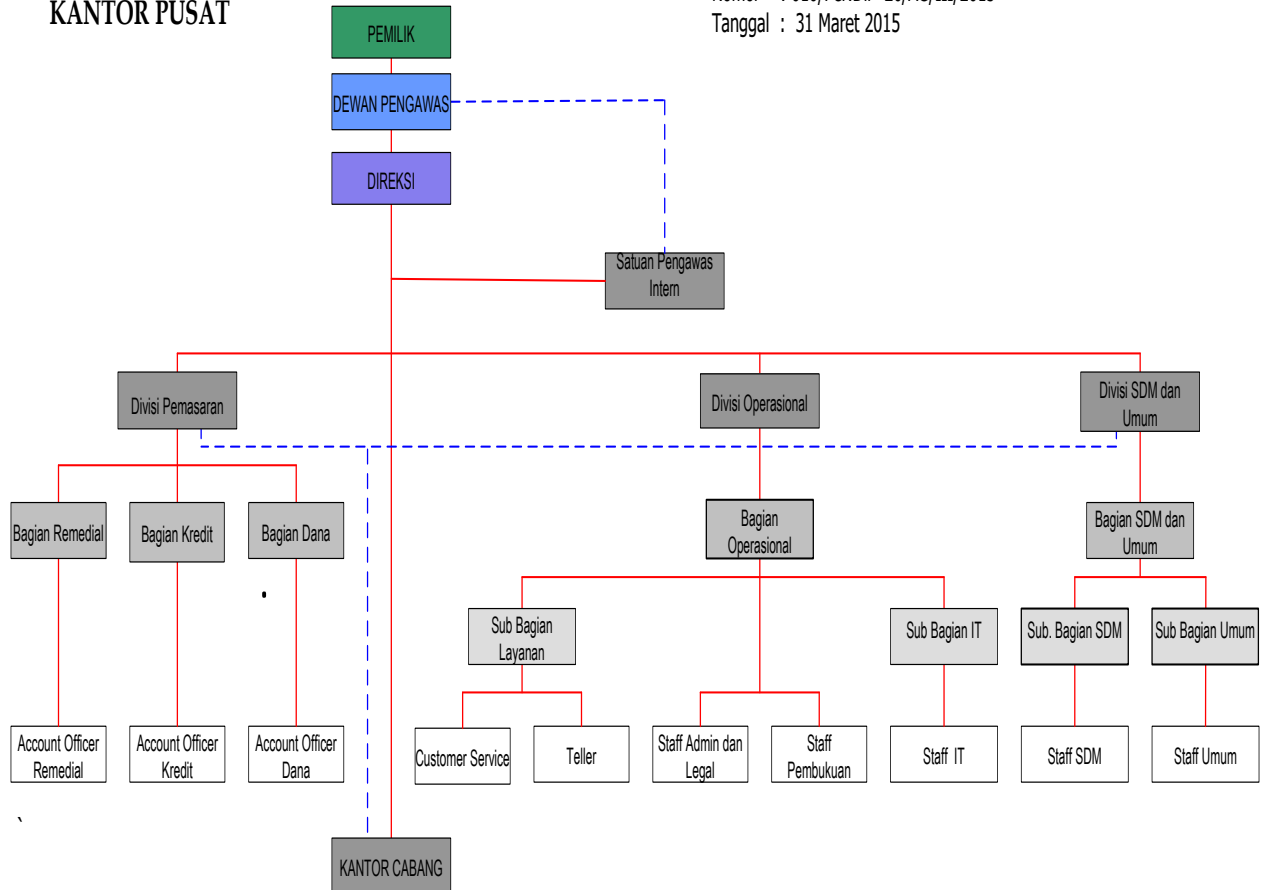
Kondisi manajemen perusahaan masih cukup layak dalam upaya mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik dilihat dari struktur organisasi dan tata kerja pegawai yang menjalankan fungsinya sesuai dengan tugasnya masing-masing dan sesuai posisi jabatannya.

Perusahaan dikelola oleh 2 Direksi (1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur), 104 Pegawai Tetap, dan 14 Pegawai Kontrak serta 34 orang pegawai kontrak lainnya.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kantor Pusat:

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PUSAT**

Lampiran I Peraturan Direksi PD. BPR Artha Galunggung
 Nomor : 010/Per.Dir- 26/AG/III/2015
 Tanggal : 31 Maret 2015



DEDEH MISRIATI
 Direktur Utama

MAHMUD RAMLI
 Direktur

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya

Sumber: PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya

3.5.2 Tugas Wewenang Masing-Masing Bagian di PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Operasional Tasikmalaya

1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemilik/RUPS, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Artha Galunggung.

2. Direktur Utama

Direktur utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BPR Artha Galunggung.

Fungsi direktur utama:

- a. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengarahan serta evaluasi terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas anggota Direksi, Divisi, dan Kantor Cabang.
- b. Pemimpin kolektif jajaran Direksi dalam menjalankan manajemen operasional.
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada seluruh unit kerja.

3. Direktur

Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian serta evaluasi seluruh kegiatan divisi, dan kantor cabang sesuai dengan bidang tugasnya.

Direktur mempunyai fungsi:

- a. Koordinator, pengawasan dan pengarahan serta evaluasi terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas Divisi dibawahnya dan Kantor Cabang/KPO.
- b. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas penyusunan perencanaan kegiatan operasional kantor Pusat, Kantor Cabang/KPO.
- c. Pengawasan dan pengarahan serta evaluasi atas pelaksanaan supervisi kepada Kantor dan Pusat Kantor Cabang/KPO.

4. Satuan Pengawasan Intern Utama (SPI Utama)

SPI Utama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian resiko terhadap operasional perbankan BPR dalam rangka pengamanan aset BPR dan menjamin dipatuhinya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan visi misi dan nilai-nilai perusahaan.
- b. Terselenggaranya kegiatan pelayanan dan operasional perbankan BPR dijalankan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* dan kebijakan-kebijakan BPR yang berlaku.
- c. Terselenggaranya kegiatan pencatatan pembukuan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi keuangan BPR yang berlaku.

5. Satuan Pengawasan Intern Madya (SPI Madya)

SPI Madya mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. Membantu SPI Utama dalam rangka pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian resiko terhadap operasional perbankan BPR dalam rangka pengamanan aset BPR dan menjamin dipatuhinya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan visi misi dan nilai-nilai perusahaan.
- b. Membantu SPI Utama dalam rangka pemeriksaan bukti-bukti transaksi keuangan beserta dokumen pendukung lainnya.

6. Staff SPI

Membantu SPI Madya dalam rangka pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian resiko terhadap operasional perbankan BPR dalam rangka pengamanan aset BPR dan menjamin dipatuhinya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan visi misi dan nilai-nilai perusahaan.

7. Kepala Divisi Remedial

- a. Terselenggaranya kegiatan perencanaan, arahan dan penawasan terhadap kegiatan pemantauan dan pengawasan kredit demi terciptanya kredit yang sehat baik secara konsolidasi maupun masing-masing kantor cabang/KPO.
- b. Terselenggaranya koordinasi, arahan dan pengawasan terhadap kegiatan penanganan dari penyelesaian kredit bermasalah.

8. Kabag Remedial

- a. Membantu Kepala Divisi Remedial menyelenggarakan perencanaan dalam rangka menciptakan/menjaga kondisi kesehatan.
- b. Membantu kepala Divisi Remedial dalam melakukan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah.
- c. Membantu Kepala Divisi Remedial dalam kegiatan penguasaan atas agunan kredit, somasi pengadilan dan kegiatan lelang barang-barang jaminan.

9. Account Officer Remedial

- a. Menjalankan tugas penyelesaian kredit-kredit bermasalah dalam rangka menurunkan NPL dalam rangkameningkatkan kesehatan PD. BPR Artha Galunggung.
- b. Meningkatkan pendapatan dan laba BPR dengan menangani angsuran menurunkan kolektibilitas sehingga dapat mengurangi cadangan PPAP.
- c. Menyelamatkan harta atau aset BPR dengan melakuka penarikan agunan kredit.

10. Kepala Divisi Bisnis

Terselenggaranya kegiatan perencanaan pemasaran produk-produk kredit dan produk dana serta produk jasa layanan lainnya sesuai dengan target rencana bisnis bank PD. BPR Artha Galunggung.

11. Bagian Perencanaan dan Review

Membantu kepala Divisi Bisnis dalam melakukan tugas sbagai analisis dengan melakukan pemeriksaan dan review setiap pengajuan kredit diatas BWK KPO dan Kantor Cabang untuk kelayakan pemberian kredit dengan melakukan kunjungan lapangan *On The Spot*.

12. Staff Perencanaan dan Review

Membantu Kepala Bagian Perencanaan dan Review dalam melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan legalitas dokumen-dokumen.

13. Kepala Divisi Operasional

- a. Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan standar pelayanan yang profesional.
- b. Terselenggaranya koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan penerapan APU PPT.

14. Kabag IT dan Pelaporan

- a. Membantu Kepala Divisi Operasional dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kebutuhan Teknologi Informasi.
- b. Memberikan bantuan dalam hal penyediaan informasi data kepada seluruh bagian untuk menunjang kebutuhan layanan dan kelancaran operasional.

15. Divisi SDM dan UMUM

- a. Terselenggaranya seluruh kegiatan bagaian SDM dan Umum, meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta protokoler.
- b. Terselenggaranya pengelolaan kegiatan administrasi kepegawaian.

16. Staff SDM

Melakukan analisa kebutuhan pegawai, sebagai fungsi penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan penyediaan data sebagai bahan analisa.

17. Customer Service

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, deposito atau yang lainnya.
- b. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang di sampaikan oleh nasabah atas sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayan yang diberikan oleh pihak nasababah.
- c. Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.
- d. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.

- e. Mengadministrasikan buku deposito dan buku tabungan.
- f. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

18. Teller

- a. Menerima setoran tabungan, deposito berjangka dan angsuran kredit.
- b. Membayarkan pencairan tabungan, deposito berjangka dan kredit atas persetujuan direksi.
- c. Menyetorkan uang setoran kredit, tabungan dan deposito ke Bank.
- d. Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku kas teller harian.
- e. Menyetorkan kas teller sore hari kepada koordinator administrasi dan keuangan untuk di periksa kebenarannya.
- f. Melakukan kas opname atas posisi kas harian bersama koordinator administrasi dan keuangan.

19. Satpam

Bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor, memantau keluar masuk nasabah ke kantor, pengawalan setor uang ke BI menjaga asset bank.

3.6 Tata Lokasi PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

PD. BPR Artha Galunggung dengan kantor pusat yang berlokasi di Tasikmalaya, jalan Siliwangi No. 12 Telp. (0265) 346002 Kota Tasikmalaya, dengan kantor jaringan antara lain yaitu :

Tabel. 3.2
Kantor dan Alamat

Kantor	Alamat
KANTOR PUSAT	Jl. Silliwangi No. 12 Tasikmalaya Telp. (0265)34008, 329487
KANTOR CABANG MANONJAYA	Jl. Kaum Kidul No. 09 Manonjaya Telp. (0256) 380924
KANTOR CABANG SODONGHILIR	Jl. Raya Utara No. 53 Sodonghilir Telp. (0265) 7147180
KANTOR CABANG SUKARAJA	Jl. Raya Karangnunggal No. 10 Sukaraja Telp. (0265) 566029
KANTOR CABANG KARANGNUNGGAL	Jl. Raya Karangnunggal No. 34 Karangnunggal Telp. (0265) 580247
KANTOR CABANG CINEAM	Jl. Dewi Sartika No. 44 Cineam Telp. (0265) 380676
KANTOR CABANG CIKATOMAS	Jl. BKPD No. 9 Cikatomas Telp. (0256) 7082255
KANTOR CABANG KOTA TASIKMALAYA	Jl. Paseh No. 2 Tasikmalaya Telp. (0265) 331170
KANTOR KAS CIBEREUM	Jl. Raya Manonjaya No. 173 Cibereum Telp. (0265) 335548
KANTOR KAS MANONJAYA	Jl. Kaum Kidul No. 09 Manonjaya Telp. (0256) 380916
KANTOR KAS TARAJU	Jl. Raya Taraju No. 13 Telp. (0265) 7063805
KANTOR KAS LEUWISARI	Jl. Argasari No. 15 Leuwisari Telp. (0265) 545020
KANTOR KAS KAWALU	Jl. Raya Cibauti Kawalu Telp. (0265) 333947
KANTOR KAS PASAR 1 TASIKMALAYA	Jl. Pasar Kidul Cikurubuk Ruko No. 21 Telp. (0265) 333864
KANTOR KAS BANTARKALONG	Jl. Raya Pamijahan No. 54 Simpang Bantarkalong Telp. (0265) 580384

Sumber: PD. BPR Artha Galunggung Tasikmalaya

3.7 Produk-Produk PD. BPR Artha Galunggung

Ada beberapa produk-produk yang disediakan oleh PD. BPR Artha Galunggung diantaranya sebagai berikut:

3.7.1 Produk Kredit

Produk kredit untuk semua golongan masyarakat, baik masyarakat berpenghasilan tetap, masyarakat sektor ekonomi produktif, konsumtif, dengan berbagai jenis/pilihan produk kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat antara lain:

1. Kredit Komersil

Adalah penyediaan dana pinjaman untuk keperluan modal kerja dan investasi, produk kredit:

- a. Kredit Bina Usaha Pedesaan (KBUP)
- b. Kredit Kelompok Usaha Mikro (KKUM)
- c. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mapan (KUMKM- Mapan)
- d. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prima (KUMKM- Prima)

2. Kredit Konsumer

Adalah penyediaan dan untuk keperluan yang bersifat konsumtif, produk kredit:

- a. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKKB)
- b. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- c. Kredit MultiGuna Mapan (KMGM)
- d. Kredit Pegawai Berpenghasilan Tetap (KPBT)

3. Kredit Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPPER)

4. Kredit Pegawai Internal

3.7.2 Produk Tabungan

Produk tabungan yang ada di PD. BPR Artha Galunggung diantaranya yaitu:

1. Tabungan Masyarakat
2. Tabungan Sigma
3. Tabungan “Tabunganku”
4. Tabungan SigmaPan Plus
5. Tabungan Sigma Junior

3.7.3 Produk Deposito

1. Deposito 1 (satu) bulan
2. Deposito 3 (tiga) bulan
3. Deposito 6 (enam) bulan
4. Deposito 9 (sembilan) bulan
5. Deposito 12 (dua belas) bulan
6. Deposito benefit Plus

3.7.4 Produk Jasa Layanan Lain

Payment point atas kerjasama dengan pihak lain (Bank Umum/lembaga lain) dalam layanan untuk pembelian pulsa seluler, listrik, pembayaran tagihan listrik, telepon dan lainnya, yaitu :

1. Payment Point dengan fasilitas *Elektronic Data Capture* (EDC)
2. *Payment Point Online Banking* (PPOB)

3.8 Orbitrase

Kredit MultiGuna Mapan merupakan penyediaan dana untuk memenuhi keperluan debitur/calon debitur dalam hal pembelian barang dan jasa (pembelian alat rumah tangga, biaya pendidikan dan lain-lain) atau bukan modal kerja.

PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Kota Tasikmalaya dalam hal menghimpun dana, menjadi salah satu prioritas sebagai sumber dana kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat. Aktivitas usaha PD. BPR Artha Galunggung

Kantor Pusat Kota Tasikmalaya dalam hal *lending* yaitu menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Prosedur pemberian Kredit di PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Kota Tasikmalaya terbagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya yaitu :

1. Tahap Permohonan Kredit.
2. Tahap Analisa Kredit.
3. Tahap Putusan Realisasi Kredit.
4. Tahap Administrasi Kredit.